

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Pedurungan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dinilai dari analisis teori yang digunakan yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan atau peraturan yang berlaku,

Selama pelaksanaan program BPNT, Kecamatan Pedurungan berkomitmen untuk menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar manfaat Program BPNT juga dapat dirasakan oleh KPM. Peraturan program BPNT ini juga menjadi pedoman bagi petugas lapangan seperti PSM dan TKSK agar selama proses verifikasi dan validasi penerima program bantuan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka sehingga dana bantuan dapat digunakan untuk mengurangi beban hidup dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan KPM.

2. Adanya kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah

Selama pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Pedurungan, semua pihak bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing kemudian saling berkoordinasi guna kelancaran program BPNT. Meskipun, selama pelaksanaan program BPNT juga menemui masalah seperti KPM menggunakan dana bantuan tidak sebagaimana mestinya, hilangnya KKS dan KPM yang lupa pin tetapi TKSK dan PSM selaku petugas lapangan akan senantiasa memberikan solusi atas

masalah-masalah yang dialami oleh KPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah yang muncul selama proses pelaksanaan program BPNT akan selalu diupayakan penyelesaiannya oleh petugas-petugas terkait

3. Pelaksanaan dan manfaat yang dikehendaki dari semua program terarah

Upaya Kecamatan Pedurungan untuk memastikan ketepatan sasaran pada program BPNT adalah dengan melakukan kunjungan rutin setiap satu minggu sekali secara acak ke rumah-rumah KPM guna melihat langsung kondisi KPM apakah bantuan dipergunakan sebagai mana mestinya. Manfaat program BPNT telah dirasakan secara langsung oleh KPM. Melalui dana BPNT, KPM merasa terbantu dalam mencukupi kebutuhan pangannya. KPM menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dana bantuan dengan menggunakan mesin atm dirasa lebih mudah dibandingkan dengan mekanisme pencairan menggunakan e-voucher. Mekanisme menggunakan mesin atm dinilai memberikan kebebasan kepada KPM untuk membelanjakan bahan pangan sesuai dengan kebutuhannya. Selain dirasakan oleh KPM, manfaat program BPNT juga dirasakan oleh warung-warung sekitar atau agen sembako terdekat karena mayoritas KPM membelanjakan di warung sekitar tempat tinggal mereka sehingga turut meningkatkan pendapatan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program BPNT di Kecamatan Pedurungan, maka diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi perbaikan program di masa mendatang:

1. Kepada Kementerian Sosial

- a. Pemerintah pusat disarankan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian (*upgrading*) terhadap nominal bantuan dana BPNT yang saat ini sebesar Rp200.000 per bulan bagi setiap KPM. Argumentasi ini didasarkan pada temuan di lapangan bahwa eskalasi harga komoditas pangan pokok akibat inflasi di wilayah urban seperti Kota Semarang berimplikasi pada penurunan kuantitas pangan yang dapat diakses oleh warga.
- b. Kebutuhan pangan bersifat harian dan tidak dapat ditunda sehingga pencairan dana bantuan dapat diusahakan untuk lancar disalurkan setiap satu bulan sekali bukan tiga bulan sekali sehingga manfaat program BPNT jadi lebih terasa oleh KPM.

2. Kepada Dinas Sosial Kota Semarang

- a. Dinas Sosial disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala bagi TKSK dan PSM mengenai mitigasi konflik sengketa data. Mengingat beban kerja petugas lapangan sangat tinggi akibat masifnya jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan, Dinas Sosial juga perlu mengevaluasi dukungan operasional bagi para jajaran pilar sosial ini. Hal ini penting guna menjaga motivasi kerja, integritas, dan konsistensi aparatur dalam menegakkan dimensi kepatuhan hukum serta menghindari potensi kelalaian ataupun maladministrasi.
- b. Optimalisasi fungsi pengawasan untuk menjamin kelancaran rutinitas fungsi pelayanan dan memastikan hak gizi KPM terpenuhi secara utuh.

3. Kepada Kecamatan Pedurungan

- a. Memaksimalkan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan, TKSK, dan PSM serta koordinasi dengan bank penyalur dan KPM.
 - b. Meningkatkan proses pengawasan guna memastikan bantuan digunakan sebagai mana mestinya dan didapatkan oleh orang yang tepat.
 - c. Kecamatan Pedurungan disarankan bisa membuat aturan main yang tegas karena seringkali, usulan nama di tingkat bawah masih dipengaruhi oleh faktor kedekatan personal atau kekerabatan. Setiap usulan dari harus disaring ulang dengan melakukan proses verifikasi dan validasi untuk menjaga agar BPNT dapat diterima oleh orang yang tepat.
4. Kepada TKSK dan PSM
- a. Petugas lapangan harus senantiasa menjaga profesionalitas selama melakukan survey lapangan agar pelaksanaan program BPNT tepat sasaran.
 - b. TKSK dan PSM disarankan untuk mengintensifkan pendekatan persuasif dan komunikasi edukatif kepada KPM yang secara faktual kondisi ekonominya telah mengalami peningkatan secara signifikan. Edukasi ini penting agar KPM yang sudah mampu bersedia melakukan graduasi mandiri secara sukarela, sehingga mempermudah TKSK dalam menjaga indikator ketepatan sasaran dan menekan laju *inclusion error* tanpa memicu gesekan sosial di tengah masyarakat.